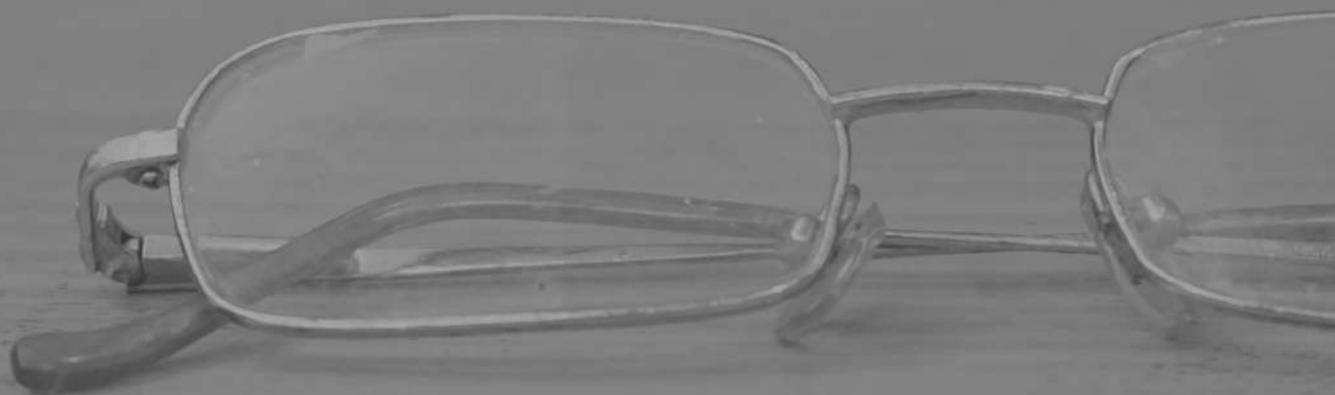




**2016**

**Laporan Tahunan**

**Annual Report**



*Foto sampul adalahacamata milik  
Humphrey Jefferson, klien sekaligus  
sahabat kami yang dieksekusi mati  
di 2016*

## Konten:

Catatan Direktur .....	1
Tentang LBH Masyarakat .....	2
Prioritas LBH Masyarakat .....	3
Pengabdian LBH Masyarakat .....	4
Melindungi Hak .....	5
Memberdayakan Masyarakat .....	12
Riset dan Analisis .....	16
Advokasi dan Komunikasi .....	17
Pelatihan, Seminar, dan Lokakarya .....	18
Pengembangan Kapasitas .....	20
Dukungan dan Kerjasama .....	21
Tim Kami .....	22



***“Bergelap-gelaplah dalam terang,  
berterang-teranglah dalam gelap.”***

Ungkapan Tan Malaka di atas nampaknya tepat untuk menggambarkan perjuangan LBH Masyarakat dalam melindungi hak dan memberdayakan masyarakat, selama sembilan tahun terakhir, utamanya di 2016.

Di 2016, LBH Masyarakat seperti berada dalam lorong gelap. Kami kehilangan Humphrey Ejike Jefferson (Jeff), sahabat sekaligus klien kami yang dieksekusi mati oleh Indonesia, tanggal 29 Juli 2016. Kami telah mendampingi masa-masa pidana mati Jeff sejak akhir 2008.

Sebelumnya, LBH Masyarakat telah kehilangan sahabat yang bernama Rodrigo Gularte. Rodrigo dieksekusi tahun 2015 silam. Seharusnya, LBH Masyarakat lebih siap dalam menghadapi eksekusi mati. Namun kenyataannya tidak mudah. Begitu Jeff dieksekusi, hari-hari kami tetap terasa begitu gelap.

Selain mendampingi dan berupaya menyelamatkan para terpidana mati dari ancaman eksekusi, LBH Masyarakat juga aktif melindungi hak asasi manusia komunitas yang sering kali dicap buruk oleh masyarakat, dianggap berdosa atau tidak bermoral. Seperti misalnya, orang dengan HIV, pekerja seks, dan kelompok lesbian, gay, biseksual dan transjender. Perjuangan kami dalam membela hak kelompok termarginalkan tersebut seperti perjuangan di dalam gelap sebab kami harus melawan arus utama masyarakat. Perjuangan tersebut juga jauh dari lampu sorot ketenaran (*fame*).

Dalam gelap itu, kami berupaya menjadi pelita, membawa terang harapan bagi mereka yang menghadapi hukuman mati atau eksekusi. Kami berada di garis terdepan, bekerja siang dan malam, dan bahkan di hari-hari tertentu kami bekerja selama 24 jam *non-stop*, untuk menyelamatkan nyawa mereka.

Sekalipun kegelapan menggelayuti, kami bersyukur masih ada dukungan dan perhatian terhadap kerja-kerja kami, masih ada cahaya terang bagi kami. Kegigihan LBH Masyarakat melakukan advokasi di persoalan di atas mendapat respon baik dari dunia internasional. Sejumlah staf LBH Masyarakat dipercaya menjadi pembicara di berbagai forum internasional. Selain itu, lebih dari 50% staf LBH Masyarakat dikutip oleh media nasional dan internasional. Tercatat setidaknya 146 artikel berita sepanjang 2016 memuat pandangan LBH Masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa LBH Masyarakat memiliki ragam keahlian dan kredibilitas dipercaya untuk memberikan analisis terkait sejumlah persoalan hak asasi manusia.

Salah satu pencapaian ini, tidak membuat kami merasa cepat berpuas diri. 2017 adalah tahun yang semakin menantang. Intoleransi meningkat, pelanggaran hak asasi manusia makin marak terjadi atas nama populisme, dan komitmen politik negara untuk memajukan agenda hak asasi manusia stagnan - bahkan berjalan mundur di beberapa isu. Untuk menyusuri lorong gelap ini, kami akan terus berbenah diri, mengembangkan kapasitas internal, untuk mempertajam kualitas analisis dan memperkuat kapasitas advokasi kami.

Akhir kata, LBH Masyarakat mengucapkan terima kasih atas dukungan para mitra, komunitas, kawan-kawan seperjuangan, dan individu-individu yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu.

Salam hormat,  
Ricky Gunawan



## Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBH Masyarakat)

merupakan perkumpulan individu yang percaya bahwa setiap insan mempunyai potensi untuk **berpartisipasi aktif dalam melakukan pembelaan dan bantuan hukum, menegakkan keadilan serta berkontribusi dalam perlindungan hak asasi manusia.**

LBH Masyarakat percaya pada **kesetaraan, non diskriminasi dan pengakuan terhadap martabat manusia yang inheren.** LBH Masyarakat membela hak setiap manusia yang tercerabut tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras, etnis, status sosial, orientasi seksual, identitas jender, status HIV, kesehatan jiwa ataupun status lainnya.

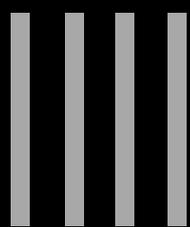
Berpegang pada keyakinan tersebut, LBH Masyarakat berjuang mewujudkan harapan sebagai bukti bakti pada ibu pertiwi. Kami **mengabdikan, menjaga mimpi dan mewujudkan cita** agar tercipta Indonesia yang demokratis, berkeadilan sosial dan menghormati hak asasi manusia.



# PRIORITAS LBH MASYARAKAT

LBH Masyarakat menemukan banyak individu dan kelompok yang terlupakan, diasingkan, bahkan dibuang hanya karena mereka dianggap berbeda oleh masyarakat umum. Mereka menjadikan penjatuhan moral sebagai tameng dan legitimasi perbuatan tersebut. Ironinya, negara sebagai sebuah sistem dan payung berteduh sering kali absen dan turut melanggengkan diskriminasi kepada kelompok ini. Hal ini dapat dilihat melalui pernyataan, hukum, dan kebijakan negara yang tidak mengandung nilai hak asasi manusia. Melalui kerja-kerjanya, LBH Masyarakat memprioritaskan perlindungan hak kepada kelompok rentan, khususnya pada isu-isu berikut

FAIR TRIAL



HUKUMAN MATI



KESEHATAN



NARKOTIKA



LGBTIQ

HIV/AIDS



KESEHATAN  
JIWA



PEREMPUAN  
DAN ANAK



# PENGABDIAN LBH MASYARAKAT

## Melindungi Hak

Mendampingi korban pelanggaran HAM  
Mendorong terciptanya hukum yang non diskriminatif



## Memberdayakan Masyarakat

Memberikan perhatian pada pemenuhan hak  
Memberikan advokasi HAM  
Membantu mengatasi halangan hukum pada komunitas  
Mengembangkan kapasitas komunitas

## Riset dan Analisis

Tinjauan hukum terhadap sejumlah kebijakan  
Monitor media dan dokumentasi



## Mendampingi Korban Pelanggaran HAM

### *Semoga Tuhan Menyentuh Hati Presiden*

2016, LBH Masyarakat kembali kehilangan sahabat baik bernama Humphrey Jefferson (Jeff). Jeff dieksekusi mati atas tindak pidana narkoba yang tidak pernah dia perbuat.

Pada 2003, Jeff dijebak dan direkayasa. Dia tidak pernah mendapatkan pendampingan hukum yang memadai serta peradilan yang jujur. Jeff divonis mati dengan **pertimbangan hukum yang rasis**. Sekalipun keterangan saksi yang menunjukkan bahwa dia direkayasa sudah diajukan ke persidangan, tetapi majelis hakim mengesampingkan keterangan tersebut.



29 Juli 2016, Jeff dieksekusi mati sekalipun jangka waktunya kurang dari yang telah ditetapkan menurut hukum. **Eksekusi matinya pun melawan hukum** karena dia tengah menunggu keputusan permohonan grasi yang sudah dia ajukan ke Presiden RI.

Sebelumnya di 2015, LBH Masyarakat telah kehilangan sahabat yang bernama Rodrigo Gularte. Rodrigo adalah terpidana yang mengidap *paranoid schizophrenia* dan *bipolar disorder*. Meskipun dalam hukum Indonesia **orang dengan gangguan jiwa tidak dapat dipidana**, Rodrigo tetap menjalani proses peradilan hingga dieksekusi mati. Baik Jeff dan Rodrigo harus meregang nyawa atas perbuatan yang tidak pernah mereka lakukan. Keduanya merupakan korban dari kegagalan kebijakan narkoba.

Hingga kini, LBH Masyarakat masih memperjuangkan hak Rodrigo ke Komisi Informasi Publik

Semoga Tuhan  
Menyentuh Hati Presiden

Cerita Roni: Kerentanan yang  
Tak Terelakkan

Cerita Erni, Tuti, dan Susi  
Perempuan dalam Belenggu  
Peraturan Narkoba dan  
Hukuman Mati

Perjuangan Supir  
Transjabodetabek Melawan  
BUMN

# Cerita Roni - Kerentanan yang Tak Terelakkan

Roni, pria berusia 39 ini, tertangkap setelah membeli **ganja senilai 20.000 rupiah** dari seorang polisi yang menyamar. Jebakan yang dirancang kepolisian mengantarkan Roni pada sebuah proses persidangan. Anehnya, beberapa hari setelah persidangan, Roni harus kembali datang ke ruang sidang sebagai terdakwa atas tindak pidana yang sama namun dengan nomor register perkara yang berbeda. Ia mendapat dua putusan dengan alat bukti hasil lab dan netto zat yang berbeda. Atas kesalahan administrasi hukum tersebut, **Roni harus menanggung pidana layaknya dua orang pelaku tindak pidana.**

Putusan pertama mengharuskan Roni menjalani lima tahun penjara dan denda 800 juta rupiah. Sementara putusan kedua adalah empat tahun penjara dan denda 800 juta rupiah. Roni pun terancam mendekam di **penjara selama 9 tahun.** Mengaku pasrah, Roni menjalani kedua putusan tersebut sejak tahun 2012.

Ketika LBH Masyarakat melakukan penyuluhan rutin, pihak Lapas Salemba Jakarta mengadakan kasus Roni. Pihak lapas sangat berharap LBH Masyarakat dapat membantu Roni untuk mendapatkan keadilan. Setelah melakukan penelusuran lebih lanjut, kami menemukan keganjilan dalam proses persidangan Roni. Melihat fakta pahit tersebut, LBH Masyarakat memutuskan mendampingi Roni sebagai kuasa hukum.

Pada November 2015, LBH Masyarakat mendorong Roni untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) kepada Mahkamah Agung. LBH Masyarakat menyampaikan dasar pengajuan dan analisis hukum persidangan tersebut. Setelah enam bulan berjalan, Mahkamah Agung kemudian memberikan putusan PK Roni. Hasilnya, dari dua putusan hanya satu putusan yang berlaku yakni putusan Nomor 859/Pid.B/2012/PN JKT PST. Roni pun sekarang telah menghirup udara bebas karena telah menjalankan lima tahun masa hukumannya.

Roni hanya satu dari wajah penduduk Indonesia yang harus menghadapi ketidakadilan sistem hukum negerinya sendiri. Ada jutaan pengguna narkoba yang buta hukum dan rentan berada pada posisi seperti Roni. Selama hukum Indonesia masih melihat pengguna sebagai pelaku kriminal, selama itu pula jutaan anak bangsa berada di jurang ketidakadilan.

**#PenjaraBukanSolusi**

## Cerita Erni, Tuti, dan Susi Perempuan dalam Belenggu Peraturan Narkotika dan Hukuman Mati

Pertengahan 2016, LBH Masyarakat **membela tiga orang perempuan** yang diancam hukuman mati karena kasus narkotika. Ketiga perempuan tersebut adalah Tuti, Emi, dan Susi (bukan nama sebenarnya).

Tuti adalah seorang janda dengan latar belakang ekonomi lemah yang memiliki satu orang anak. Tuti harus menjalani proses persidangan akibat bujukan dari seorang pria asal Ghana yang mengaku sebagai pengusaha sukses di Jakarta, Kemal (bukan nama sebenarnya). Awalnya Tuti tidak tahu apa tujuan pendekatan Kemal sesungguhnya. Tuti sangat kecewa karena Kemal telah berhasil membohongi dengan cara berjanji menikahi dirinya apabila semua perintah Kemal dia turuti. Alasan itulah yang membuat Tuti mau membawa narkotika jenis sabu seberat 1,1 kg. Tak hanya kecewa dengan Kemal, Tuti pun kecewa dengan polisi yang menangkap dirinya. Tuti sudah memberikan seluruh informasi tentang Kemal namun lagi-lagi informasi yang dia berikan kepada polisi tidak pernah digubris.

Selain Tuti, Emi dan Susi pun merasakan hal sama. Setelah beberapa bulan berpacaran, Jefri, pria yang juga mengaku sebagai seorang pengusaha kaya, berhasil memengaruhi Emi untuk mencari seorang perempuan agar bersedia mengambil narkotika jenis sabu-sabu di tempat ekspedisi. Akhirnya Emi mendapatkan sosok perempuan yang diminta oleh Jefri, yaitu Susi. Susi yang sehari-hari bekerja di salon harus mau mengerjakan hal bodoh tersebut lantaran **desakan ekonomi serta hutang yang semakin melilit**.

Perintah selanjutnya adalah, Jefri meminta kepada Evi agar Susi mengambil paket berisi sabu di tempat ekspedisi di daerah Jakarta Barat sebanyak 4,5 kg, dan Emi bertugas untuk mengawasi Susi. Sesaat setelah Susi mengambil paket tersebut, keduanya langsung ditangkap oleh Polisi. Sama seperti Tuti, polisi tidak mendengarkan informasi yang diberikan Susi tentang Jefri. Pada akhirnya Jefri yang berhasil mengelabui Erni dan Susi pun lolos dari jeratan jeruji besi.

Tuti, Emi, dan Susi hanyalah korban dari para sindikat narkoba. **Faktor kemiskinan dan relasi kuasa membuat orang-orang seperti mereka mudah dimanipulasi oleh si pengedar**. Dalam beberapa kasus, terdakwa terpidana mati mungkin menyadari apa yang mereka lakukan, namun dalam kasus lain, hal tersebut belum tentu terjadi. Polisi menyiksa dan memaksa korban sehingga mereka terpaksa mengakui perbuatannya.

Dalam membela kasus Tuti, Emi, dan Susi, kami telah bekerja secara maksimal dan berhasil menghindarkan mereka dari hukuman mati. Selain menghadirkan saksi-saksi yang meringankan, kami juga memanggil ahli untuk memberikan informasi mengenai kerentanan perempuan sebagai kurir dalam sindikat narkotika.





## Perjuangan Supir Transjabodetabek Melawan BUMN

Pada Juni 2015, LBH Masyarakat memberikan bantuan hukum kepada **11 pengemudi Transjabodetabek**. Kesebelas pengemudi Transjabodetabek tersebut telah bekerja sejak November 2014 untuk Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Djakarta (Perum PPD) dengan perjanjian kerja waktu tertentu selama satu tahun. Di 2015, Pemerintah DKI Jakarta menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 176 Tahun 2014 tentang Upah Minimum Provinsi yang pada intinya menaikkan UMP 2014. Meski telah terdapat perubahan Pergub, **perusahaan tidak menyesuaikan upah minimum pekerja** dengan Pergub. Selain itu, **perusahaan tidak membayarkan uang Tunjangan Hari Raya** sesuai dengan peraturan yang berlaku dan juga **tidak mendaftarkan para pekerja ke dalam BPJS**. Atas tindakan perusahaan tersebut, para pekerja mengalami kerugian dan terlanggar hak-haknya sebagai pekerja.

**LBH Masyarakat telah mengupayakan audiensi sebanyak tiga kali** antara para pengemudi dan pihak perusahaan untuk mencari solusi terbaik bagi kedua belah pihak. Namun, audiensi tidak pernah terlaksana karena perusahaan melalui surat resmi menyatakan bahwa perusahaan telah memenuhi hak-hak normatif yang telah dijamin dalam perjanjian kerja. Oleh karena itu, LBH Masyarakat mendorong para pengemudi untuk melaporkan perselisihan tersebut kepada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Timur. Di tahap ini, LBH Masyarakat hanya berperan sebagai *shadow lawyer*, tidak mendampingi para pengemudi secara langsung.

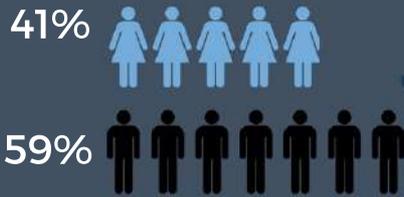
Setelah proses yang cukup panjang, Sudin memutuskan untuk mengabulkan permohonan para pengemudi dan menganjurkan perusahaan untuk membayarkan kerugian yang telah dialami oleh para pengemudi. Meski telah memenangkan perkara di tingkat mediasi, para pengemudi belum juga bisa menikmati hak-haknya. Sehingga pada Januari 2016, LBH Masyarakat mewakili para pengemudi mengajukan gugatan perselisihan hubungan industrial ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakarta Pusat). Pada 18 Juli 2016, PN Jakarta Pusat mengabulkan sebagian gugatan LBH Masyarakat dan mewajibkan Perum PPD untuk memenuhi hak-hak para supir. Namun atas putusan tersebut, Perum PPD mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Hingga akhir tahun 2016, MA belum mengeluarkan putusan kasasi.

# INFOGRAFIS PENANGANAN KASUS

## JENIS BANTUAN HUKUM



## KASUS PEREMPUAN



## USIA PEMOHON

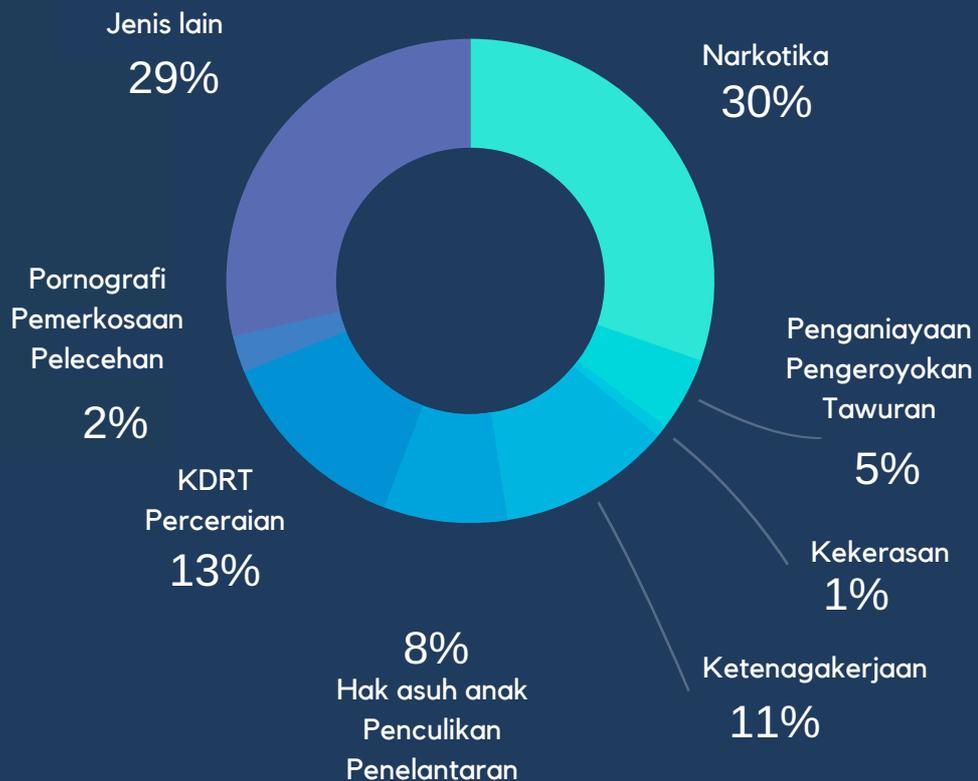


HUKUMAN MATI:  
9 NARKOTIKA  
1 PEMBUNUHAN

2016

Total  
122 kasus

## JENIS KASUS >



## Mendorong Terciptanya Hukum yang Non Diskriminatif

### Kriminalisasi Seks Pra-nikah dan LGBT

Pada Agustus 2016, LBH Masyarakat menjadi kuasa hukum Komnas Perempuan sebagai pihak terkait di Mahkamah Konstitusi, dalam kasus *judicial review* **kriminalisasi hubungan seks pra-nikah dan hubungan seks sesama jenis**. *Judicial review* tersebut diajukan oleh Aliansi Cinta Keluarga Indonesia (AILA) dengan alasan karena hubungan seks pra-nikah dan sesama jenis dianggap menyebarkan HIV/AIDS, tidak sesuai norma ketimuran. Selain itu, homoseksual juga dianggap sebagai penyakit jiwa dan bisa menular. Terhadap *judicial review* tersebut, kami menyampaikan bahwa kriminalisasi hubungan seks pra-nikah dan sesama jenis itu **bertentangan hak privasi**. Argumen bahwa homoseksual adalah gangguan kejiwaan dan bisa menular juga **tidak didukung oleh bukti ilmiah yang meyakinkan**. Untuk memperkuat dalil tersebut kami menghadirkan sejumlah ahli hukum dan HAM, hukum pidana, psikologi, kriminologi, pendidikan, filsafat, dan saksi penghayat kepercayaan.



Kriminalisasi Seks Pra-nikah  
dan LGBT

Diskriminasi di Gorontalo

Investigasi Penangkapan  
Gay di Apartemen  
Kalibata City

## Diskriminasi di Gorontalo

LBH Masyarakat bersama Suara Kita melakukan audiensi dengan Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi Pendidikan Tinggi. Audiensi ini dilakukan sebagai bentuk advokasi terhadap pernyataan Rektor Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Syamsu Qomar Badu yang menyatakan tidak akan memberikan beasiswa dan tidak mengikutsertakan mahasiswa yang beridentitas LGBT pada kegiatan kampus. Pernyataan diskriminatif ini jelas **berpotensi menimbulkan tindakan diskriminatif yang melanggar hak atas pendidikan**. Terlepas dari penilaian moral yang dijatuhkan terhadap individu, **pendidikan pada dasarnya adalah hak setiap orang**. Dalam audiensi, LBH Masyarakat menyampaikan agar Kemenristekdikti tidak membiarkan praktik diskriminatif terjadi di ranah pendidikan termasuk di UNG. Baik LBH Masyarakat dan Dirjen sepakat bahwa pendidikan adalah hak semua orang dan bebas dari berbagai kepentingan.

## Investigasi Perangkapan Gay di Apartemen Kalibata City

November 2016, Front Pembela Islam (FPI) menggerebek apartemen Kalibata City. FPI menuduh telah terjadi pesta gay dan meminta Kepolisian Sektor Pancoran (Polsek Pancoran) untuk melakukan penangkapan terhadap **13 laki-laki**. Menanggapi hal tersebut, LBH Masyarakat mengambil tindakan cepat dengan **melakukan investigasi lebih lanjut** ke Polsek Pancoran dan menawarkan bantuan hukum kepada ketigabelas orang tersebut. Namun demikian, kepolisian sudah mengambil tindakan pengamanan dan melepas ketigabelas orang tersebut. Pelepasan ini didasarkan pada **tidak adanya ketentuan hukum pidana yang dilanggar** oleh ketigabelas orang tersebut. Polsek tidak memberitahukan tindakan tersebut untuk menghindari keberatan dari FPI. Atas tindakan Polsek yang tidak menahan ketigabelas orang, LBH Masyarakat menyampaikan surat apresiasi untuk keberanian dan keputusan Polsek Pancoran melindungi warga Negara dari sikap-sikap intoleransi kelompok militan agama.

"Pendidikan adalah hak semua orang dan bebas dari berbagai kepentingan"

# Memberdayakan Masyarakat

## Memperhatikan Pemenuhan Hak Warga Negara

### Memberikan Pelatihan Hukum dan HAM

Memberikan Pelatihan HAM



Mengembangkan Kapasitas Komunitas



Sepanjang tahun 2016, LBH Masyarakat memberikan pelatihan hak asasi manusia kepada komunitas, paralegal, dan mahasiswa melalui kerja dan program yang telah dirancang.

# Memberikan Pelatihan HAM

## Living The Human Rights

### 20 Mahasiswa Jakarta dan Jember

LBH Masyarakat menyelenggarakan Living the Human Rights (LIGHTS), sebuah program intensif pendidikan hak asasi manusia. LBH Masyarakat menyediakan kelas teori dan praktik. Peserta yang merupakan mahasiswa, diajak mengunjungi komunitas populasi kunci HIV/AIDS dan komunitas Kali Adem.



## Young People Who Use Drugs

### 60 Anak Batam, Lombok, dan Yogyakarta

LBH Masyarakat memberikan pelatihan hukum dan hak asasi manusia kepada anak pengguna narkoba. Pelatihan serupa namun lebih intensif dilaksanakan di Jakarta, yang kemudian dilanjutkan dengan perekrutan paralegal anak pemakai narkoba bagi mereka yang lolos seleksi.



## Pendokumentasian Pelanggaran HAM

### 30 pencatat 17 Kota/Kabupaten

LBH Masyarakat terlibat dalam pendokumentasian pelanggaran HAM terhadap populasi kunci. Sebanyak 30, dari 60 orang kandidat, terpilih menjadi pendokumentasi dan mendapatkan pelatihan metode pendokumentasian. Selain melatih para pendokumentasi, LBH Masyarakat juga memimpin pengumpulan data dan analisis terhadap data-data yang berhasil dikumpulkan tersebut.



## The Global Fund



### Pelatihan HAM

LBH Masyarakat mengadakan pelatihan dasar dan pelatihan paralegal kepada populasi kunci HIV/AIDS, TB, dan Malaria di **17 kota Indonesia**. LBH Masyarakat memastikan pelatihan berjalan efektif dengan membekali peserta dengan modul yang berisi topik-topik yang diangkat selama pelatihan. Tercatat sebanyak **362 peserta** telah mendapatkan kesadaran hukum dan HAM, dan **69** di antaranya lulus seleksi sebagai paralegal komunitas.



**17 Kota**



**362**

Peserta

### Lokakarya Hak Perempuan Positif

Kedua, LBH Masyarakat juga terlibat aktif memfasilitasi lokakarya integrasi **layanan HIV** dengan layanan bagi **korban kekerasan perempuan** di **8 kota/kabupaten** se-Indonesia.

**8 Kota dan  
Kabupaten**

## Mengembangkan Kapasitas Komunitas

Kegiatan yang membedakan LBH Masyarakat dengan organisasi bantuan hukum dan HAM pada umumnya ialah mengadakan pemberdayaan hukum komunitas. LBH Masyarakat percaya bahwa semua orang memiliki kapasitas, dan pemberdayaan hukum dilakukan untuk mengembangkan kapasitas tersebut. Berbekal ilmu dari pemberdayaan tersebut, masyarakat dapat dengan mandiri melakukan 'penanganan pertama' pada kasus-kasus hukum yang dia, atau orang sekitarnya alami. Oleh karena itu, apapun isu yang dikerjakan oleh LBH Masyarakat, pemberdayaan menjadi satu unsur penting yang tidak akan tertinggal.

Adapun komunitas yang diberdayakan oleh LBH Masyarakat adalah **nelayan miskin Kali Adem**, **komunitas pengguna narkotika** di berbagai daerah di **Jakarta** dan sekitarnya, serta **komunitas waria** di daerah **Bogor**.

Di **Kali Adem**, selain kunjungan rutin dan diskusi hukum, LBH Masyarakat juga menyelenggarakan acara nonton bareng film Jakarta Unfair, yang berkisah tentang pengusuran dan ketidakadilan. Dalam kegiatan ini warga kali adem juga mengikuti lomba membuat rumah idaman. ketiga pemenang mendapatkan hadiah sembako hasil donasi dari masyarakat umum yang menghadiri acara ini.

## Community Legal Empowerment Forum (CLE Forum)

Sehubungan dengan telah terbentuknya sekelompok paralegal LBH Masyarakat yang berasal dari komunitas rentan terinfeksi HIV – lazim disebut sebagai populasi kunci-, LBH Masyarakat melaksanakan Community Legal Empowerment Forum (CLE Forum) kepada **18 paralegal** yang ditujukan untuk meningkatkan pemahaman, serta keterlibatan paralegal dalam kerja-kerja LBH Masyarakat terkait.

## Komunitas Tahanan

Komunitas lain yang diberdayakan ialah tahanan. LBH Masyarakat bekerjasama dengan beberapa rutan dan lapas, rutin menyelenggarakan penyuluhan.

- **Rumah Tahanan Cipinang**
- **Rumah Tahanan Perempuan Pondok Bambu**
- **Rumah Tahanan Salemba**
- **Lembaga Pendidikan Khusus Anak Salemba**

LBH Masyarakat telah melakukan penyuluhan kepada:

**813 Tahanan**

**25%** di antaranya mendapat bantuan berupa **konsultasi**



## Ketika Anak Pengguna Narkotika Tak Lagi Didengar

Guna memetakan situasi pemenuhan hak anak pemakai narkotika, LBH Masyarakat melakukan tinjauan hukum dan kebijakan di tiga aspek, yaitu pencegahan, perawatan, dan penerapan hukum. Dari penelitian ini, terlihat banyaknya kekosongan hukum pada aspek pencegahan dan perawatan pemakaian narkotika, yang seharusnya menjadi fokus utama pemerintah dalam persoalan anak pemakai narkotika. Pada aspek penegakan hukum, anak pemakai narkotika kehilangan hak diversi karena ancaman pidananya di atas tujuh tahun penjara.

## Aspek HAM terhadap Program dan Implementasi IPWL

Perhatian kami pada aspek pemenuhan hak atas kesehatan pengguna narkotika mendorong kami untuk meneliti aspek hukum dan hak asasi manusia terhadap program dan implementasi Intitusi Penerima Wajib Lapor (IPWL). Penelitian ini sendiri dimulai pada akhir 2015 dan dilaksanakan di **6 (enam) kota** di Indonesia yakni Medan, Batam, Jakarta, Samarinda, Makassar, dan Denpasar. Selain melakukan studi pustaka, para peneliti di riset ini juga melakukan wawancara terhadap pemberi layanan dan juga penerima layanan.

## Monitor Media dan Dokumentasi



Sejak Januari 2016, LBH Masyarakat juga memulai kerja monitoring media dan dokumentasi, atas isu-isu berikut:

- kesehatan jiwa,
- stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV,
- kematian di dalam lembaga pemasyarakatan,
- penggerebekan narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan,
- penggerebekan narkotika dalam jumlah besar,
- stigma terhadap kelompok lesbian, gay, biseksual dan transjender (LGBT), dan
- implementasi Qanun Jinayat di Aceh.

## Dampak Kerja Paralegal

Di pertengahan tahun 2015, dua orang profesor dari University of Southern California, Sofia Gruskin dan Laura Ferguson, datang ke LBH Masyarakat untuk berdiskusi tentang kerja paralegal. Berangkat dari diskusi tersebut, kami melakukan penelitian bersama untuk mengetahui dampak kerja paralegal LBH Masyarakat dalam akses terhadap peradilan yang adil dan akses terhadap kesehatan anggota komunitasnya. Pengambilan data telah dimulai sejak pertengahan tahun 2016. Sampai sekarang, pengambilan data kuantitatif sudah dilakukan terhadap **24 orang paralegal**. Penelitian ini diproyeksikan akan selesai di tahun 2017.

## Tinjauan hukum nasional terkait HIV

Terakhir, masih terkait dengan penelitian, LBH Masyarakat juga melakukan penelitian peninjauan hukum nasional terkait dengan HIV. Selain studi literatur, LBH Masyarakat juga melakukan diskusi kelompok terbatas dengan pemangku kebijakan dan komunitas populasi kunci di **6 (enam) kota/kabupaten**. Diseminasi hasil pendokumentasian dan peninjauan hukum nasional akan dilakukan paling lambat kuartal ketiga 2017.

# ADVOKASI DAN KOMUNIKASI

LBH Masyarakat melakukan advokasi dan pemberdayaan masyarakat melalui komunikasi digital. Informasi seputar hak asasi manusia dengan spesifik isu yang menjadi fokus kerja LBH Masyarakat didesiminasikan melalui media sosial dan media arus utama. Hal ini bertujuan agar pemahaman mengenai hak tidak hanya didapat oleh komunitas tetapi juga masyarakat umum.

## WEBSITE



- 17** Rilis Pers
- 2** Policy Brief
- 22** Artikel Berita
- 7** Artikel Blog
- 4** Penelitian

## FACEBOOK

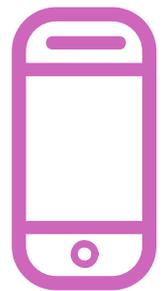


**2.518** followers  
**13.600** likes untuk **240** post di tahun 2016  
Demografi:  
**28%** followers perempuan

- Video Pidato Direktur LBH Masyarakat pada UNGGAS 2016 disaksikan oleh lebih dari **14.000** orang
- Vlog kelima di Nusa Kambangan disaksikan oleh setidaknya **1.200** orang
- Poster Vigil Eksekusi Mati di-*share* oleh lebih dari **80 orang**

## LIPUTAN MEDIA

**146** berita meliput LBH Masyarakat  
**8** dari **15** staf dikutip di dalamnya  
**41,78%** dalam bahasa asing



## TWITTER



**886** Followers  
Demografi:  
Sebesar **73%** berusia **18-34** tahun

Staf LBH Masyarakat mengisi pelatihan, lokakarya, seminar, dan sebagainya dari beragam institusi, baik masyarakat sipil, universitas, maupun lembaga pemerintah.

# PELATIHAN SEMINAR LOKAKARYA

2016

Pembicara	Pembicara
12th International Congress on AIDS in Asia and the Pacific, Bangladesh	United Nations General Assembly Special Session (UNGASS) 2016, Amerika Serikat
Fasilitator	Pembicara
Lokakarya Penyusunan Rencana Kerja Paralegal Komunitas, UNODC, Bali	6th World Congress Against the Death Penalty, Norwegia
Fasilitator	Pembicara
Lokakarya Hak Perempuan Positif, Lombok dan Padang	2016 Asia Pro-bono Forum, Bali
Pembicara	Pembicara
3rd International Conference on Law and Public Health, Belanda	Diskusi Publik Perang terhadap Narkotika, Filipina
Fasilitator	Delegasi
Pelatihan Jurnalistik Hukuman Mati dalam Perspektif HAM, Jakarta	25th National Harm Reduction Conference, Amerika Serikat
Pembicara	Pembicara
Seminar Edukasi Understanding Diversity Sexuality, Depok	Diskusi Kesehatan Jiwa dan Pemutaran Film "The Bird Dancer", Depok
Fasilitator	
Pelatihan Paralegal Pengguna Narkotika, Afrika Selatan	

# LBH Masyarakat di Tingkat Internasional

## The United Nations General Assembly Special Session (UNGASS) 2016

Pada kesempatan UNGASS tahun 2016, Ricky Gunawan mewakili masyarakat sipil, menyuarakan aspirasi mengenai situasi kebijakan narkoba di Indonesia. Ricky memaparkan dampak-dampak yang timbul akibat wacana perang narkoba dan kebijakan punitif seperti hukuman mati. Sebelumnya ia sempat dijegal oleh beberapa pihak untuk hadir dalam acara ini. Namun, PBB pun memberikan tempat kepada Ricky untuk berbicara. Atas semangat juang, jerih payah, dan keberaniannya, Ricky mendapatkan apresiasi *standing applause* dari seluruh delegasi yang hadir. Video pidato Ricky di UNGASS ini pun ditonton oleh lebih dari 14 ribu orang.

**"They were first sentenced as drug traffickers. But when they were executed, they were remembered as artist, as painters, as computer teachers, and as prison's church leaders."**

- Ricky Gunawan

## Paralegal Training in South Africa (Program Mainline 2016)



Yohan Misero bersama perwakilan dari Persatuan Korban Napza Indonesia (PKNI) menjadi fasilitator pelatihan paralegal pengguna narkoba di Afrika Selatan. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Bridging The Gap dan South-South Exchange Project yang diselenggarakan oleh Mainline. Pelatihan diadakan selama enam hari di kota Pretoria dan Cape Town.



## Pengembangan Kapasitas

Pada salah satu kesempatan penyuluhan hukum, LBH Masyarakat memberdayakan staf keuangannya untuk memberikan materi proses persidangan pidana setelah yang bersangkutan secara aktif mengikuti sesi-sesi penyuluhan-penyuluhan hukum yang dilakukan oleh LBH Masyarakat, dan belajar (diskusi internal) mengenai proses persidangan pidana itu sendiri. Bagi kami, ini merupakan pencapaian tersendiri. Sebuah pembuktian bahwa pemberdayaan pun terjadi secara internal di organisasi ini.

Selain itu, sepanjang 2016, LBH Masyarakat juga telah menginvestasikan dana sebesar **Rp. 68.159.123,-** (enam puluh delapan juta seratus lima puluh sembilan ribu seratus dua puluh tiga rupiah), untuk pengembangan kapasitas staf LBH Masyarakat. Pengembangan kapasitas tersebut mencakup, antara lain, Human Rights Summer School course di University of Essex untuk dua orang, kursus filsafat feminisme untuk dua orang, kursus menulis TEMPO untuk dua orang, dan kursus statistik untuk seluruh staf.

# DUKUNGAN DAN KERJASAMA

## Terima

## Kasih

Sepanjang tahun 2016, banyak hal yang LBH Masyarakat telah lalui. Tangis dan tawa, kasih sayang dan rasa kehilangan, caci makian, menjadi makanan sehari-hari. Namun, kami selalu menjadikan kembalinya senyuman dari mereka yang pernah terlanggar haknya sebagai acuan dan semangat baru.

Berbekal keyakinan dan semangat, LBH Masyarakat telah mendapatkan beberapa pencapaian. Setiap pencapaian kami terkandung kontribusi berupa dukungan dan kerjasama dari teman-teman lembaga terkait.

Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung seperti Open Society Foundations (OSF), Levi Strauss Foundation (LSF), UNAIDS Indonesia, The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis, and Malaria (GF), International Bridges to Justice, University of Southern California, serta organisasi dan individu lain yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu.





# LBH MASYARAKAT

**EMPOWERING COMMUNITIES, DEFENDING RIGHTS**

## **Ricky Gunawan** Direktur

Menyelesaikan MA Human Rights in Theory and Practice di University of Essex, di Inggris. Ricky terlibat aktif dalam diskusi dan advokasi hak asasi manusia baik di tingkat nasional maupun internasional.

## **Ajeng Larasati** Kordinator Riset dan Kebijakan

Ajeng menempuh pendidikan LLM Economic, Social and Cultural Rights di University of Essex, dan menjadi relawan Human Right Watch di Inggris pada tahun 2016. Ajeng banyak terlibat dalam program dan diskusi kebijakan penanggulangan HIV/AIDS dalam kerangka hak asasi manusia.

## **Muhammad Afif** Koordinator Advokasi Kasus

Berawal dari aktif dalam gerakan mahasiswa di kampusnya, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Afif melanjutkan pengabdian di LBH Masyarakat. Sebagai Koordinator Advokasi Kasus, Afif memimpin penanganan kasus-kasus strategis LBH Masyarakat, termasuk kasus hukuman mati.

## **Antonius Badar** Koordinator Internal

Badar meraih gelar sarjana hukum dari Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Badar, yang juga adalah seorang pengacara publik di LBH Masyarakat, aktif dalam bantuan hukum, penyuluhan hukum di rumah tahanan di Jakarta, dan menangani beberapa kasus anak, narkoba, dan ketenagakerjaan.

## Naila Rizqi Zakiah

### Staf Penanganan Kasus

Naila mengenyam pendidikan hukum di Universitas Jember. Setelah menjadi relawan di LBH Masyarakat Jember, Naila melanjutkan karirnya di LBH Masyarakat Jakarta, dan sekarang aktif mengadvokasi kasus-kasus anak dan LGBT.

## Yosua Octavian

### Staf Penanganan Kasus

Setelah mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Kristen Indonesia, Yosua menjadi relawan LBH Masyarakat. Kini dia aktif menangani sejumlah kasus-kasus pelanggaran HAM terkait isu narkoba dan hukuman mati.

## Arinta Dea Dini

### Analisis Gender

Usai mengenyam pendidikan hukum di Universitas Indonesia, Arinta aktif menjalankan kajian-kajian hak asasi manusia terkait isu gender dan perempuan. Selain itu, dia juga terlibat dalam penanganan kasus strategis sejumlah kasus pelanggaran HAM berdimensi gender.

## Albert Wirya

### Peneliti

Menjadi relawan LBH Masyarakat saat masih berstatus mahasiswa Kriminologi di Universitas Indonesia, Albert sekarang memimpin program advokasi dan penelitian LBH Masyarakat berkaitan dengan kesehatan jiwa. Albert juga kerap terlibat dalam penanganan kasus anak dan perempuan.

## Dominggus Christian

### Pengacara Publik

Selain aktif dalam penanganan kasus anak, narkoba dan kekerasan dalam rumah tangga, Chris juga terlibat dalam koalisi masyarakat sipil untuk reformasi hukum pidana. Chris adalah lulusan Fakultas Hukum Universitas Pancasila.

## Riki Efendi

### Staf Penanganan Kasus

Mengawali pengabdian di LBH Masyarakat sebagai paralegal, Riki sekarang aktif menyediakan bantuan hukum dan pelatihan hukum bagi komunitas pengguna narkoba. Riki juga banyak melakukan kerja-kerja investigasi pelanggaran hak asasi manusia di kasus-kasus narkoba.

## Fuji Aotari

### Staf Program

Fuji mengelola program-program LBH Masyarakat terkait HIV/AIDS dan kebijakan narkoba. Lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini terlibat dalam advokasi kebijakan HIV di tingkat nasional.

## Yohan Misero

### Analisis Kebijakan Narkoba

Seorang lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Yohan turut mengelola program komunikasi LBH Masyarakat. Di samping itu, Yohan memimpin sejumlah advokasi kebijakan narkoba yang LBH Masyarakat lakukan di level nasional.



## Herlina Administrator

Selain melakukan pekerjaan administratif, Lina terlibat aktif dan berkontribusi dalam kegiatan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan.

## Dede Khaerudin Staf Keuangan

Mengerjakan keuangan LBH Masyarakat, Dede juga turut memberikan penyuluhan hukum di beberapa kesempatan.

## Ali Mudopar Kepala Rumah Tangga

Selain mengerjakan pekerjaan rumah tangga, Dopar juga berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pelatihan dan program kampanye LBH Masyarakat.

## RELAWAN

Selama 2016, terdapat 13 relawan yang mengabdikan diri di LBH Masyarakat. Satu di antaranya adalah mahasiswa asal Australia. Dua orang relawan kemudian berlanjut menjadi staf di LBH Masyarakat, terhitung sejak akhir Februari 2017.



## KONTAK

WEBSITE : [www.lbhmasyarakat.org](http://www.lbhmasyarakat.org)

FACEBOOK: @LBHM.id

EMAIL : [contact@lbhmasyarakat.org](mailto:contact@lbhmasyarakat.org)

TELP : (021) 837 897 66

**Selamat Datang Pejuang!**

# Staf Baru

**Gilbert Lianto**

Staf Fundraising



**Astried Permata**

Staf Komunikasi



[www.lbhmasyarakat.org](http://www.lbhmasyarakat.org)

Jalan Tebet Timur Dalam VI E No. 3, Tebet, Jakarta Selatan,  
12820, Indonesia

Foto sampul depan oleh Ricky Gunawan